

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Pengelolaan Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Tahap perencanaan pada pemerintah Kabupaten Belu belum berjalan dengan baik karena masih terdapat sisa anggaran yang belum dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan publik karena masih terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi dengan baik.
2. Tahap pelaksanaan pada pemerintah Kabupaten Belu belum berjalan dengan baik karena item yang terdapat dalam belanja modal belum terealisasi dan terdapat anggaran yang tersisa karena adanya penghematan anggaran serta kurangnya inovasi dan pemberdayaan anggaran oleh sumber daya manusia yang ada. Belum dikatakan baik jika anggaran itu lebih karena dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan anggaran yang ada atau tidak terealisasi sehingga anggaran yang lebih harus dikembalikan ke kas daerah, walaupun kurang dapat dikatakan tidak baik karena ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya anggaran.
3. Tahap penatausahaan belum dilakukan secara memadai karena belum mampu menghimpun, mencatat, mengolah, mengganda, mengirim dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam Kabupaten Belu.

4. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dikatakan belum optimal karena terdapat saldo aset tetap yang tidak disajikan secara terperinci.
5. Tahap pengawasan, diketahui masih terdapat kelalaian dalam hal ini setiap proporsi belanja kurang diperhatikan sehingga dalam pelaksanaan belanja modal masih tersisa anggaran serta pelaporan dan pertanggungjawaban saldo aset tetap tidak disajikan secara terperinci.
6. *Budgetary Slack* Belanja Modal pada Pemerintah Belu tidak terjadi dikarenakan belanja modal berkaitan dengan kebutuhan publik sehingga tidak bisa buat *budgetary slack* dan selama ini realisasi dan anggaran itu dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Belu perlu melakukan perencanaan dengan lebih cermat dalam pengelolaan keuangan serta merencanakan belanja sebaik mungkin sehingga dapat terserap dengan maksimal, dan lebih memperhatikan setiap OPD dalam mengelola belanja modalnya khususnya dalam tahap pelaksanaan agar lebih memanfaatkan dengan baik anggaran yang telah diberikan.
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset, khususnya di bidang aset harus dibenahi pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap sesuai dengan sistem prosedur yang ada.

3. Bagi peneliti lain, diharapkan tulisan ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lain guna melakukan penelitian lebih lanjut dalam lingkup yang sama

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy, Abdul Halim. 2006. *Study Atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah*.
- Anonim, 2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Bernadethe Mida Bai. 2018. *Analisis Pengelolaan Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013-2015*.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit: Salemba Empat Jakarta
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta :Erlangga
- Mey Maldianti Mukin (2013) *Analisis Pengelolaan Belanja Kota Kupang Tahun Anggaran 2011-2013*.
- Muhamad Zulkifli (2013) Analisis Faktor yang Berpengaruh Terhadap Alokasi Pengelolaan Belanja Modal Pemerintah Kab/ kota di Provinsi Sulawesi Selatan (periode 2007-2011) udge
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2011 *Tentang pedoman Penyusunan anggaran PENDapatan Dan BELanja Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Penyusunan APBD*.
- PerpusUnwira.ac.id Skripsi: Analisis Pengelolaan Belanja Modal Pemerintah Kota Kupang*
- Suartana (2010:137) Budgetary Slack*.
- Sugiono 2013 :2 *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2016 tentang *Perangkat Daerah*.
- Wardani (2014) Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap *Budgetary Slack* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo.
- Witton dalam samat (2009) Budgetary Slack*.

WEB:

https:// www. Seputar Pengetahuan.co.id

WWW.bpkp.go.id

https:// www. Seputar Pengetahuan.co.id

WWW.djpk.kemenkeu.go.id

https:// www. Seputar Pengetahuan.co.id

Scholar.goole.co.id Bugetary Slack .